

BAB II KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Konsep yang Relevan dengan Penelitian

2.1.1 Konsep tentang Pemberdayaan

2.1.1.1 Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan menurut Ife (Edi Suharto 2015), yang dimaksud dengan pemberdayaan, ada dua pengertian kunci yaitu, kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini bukan hanya menyangkut mengenai kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:

1. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan kesempatan hidup kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, dan pekerjaan.
2. Pendefinisian kebutuhan kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan apresiasi dan keinginannya.

Ide atau gagasan kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan. Lembaga-lembaga: kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan. Aktivitas ekonomi kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa. Reproduksi kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Gutierezz (Adi Fahrudin, 2012) mengemukakan pemberdayaan adalah Proses meningkatkan potensi diri, kekuatan pribadi, antarpribadi, atau politik sehingga individu-individu, keluarga-keluarga, dan komunitas komunitas dapat mengambil

tindakan dalam memperbaiki situasi-situasi mereka. Pemberdayaan merujuk kepada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan dan pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampadon aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan adalah “Proses membantu individu, keluarga, kelompok, organisasi, dan komunitas untuk meningkatkan kekuatan interpersonal, personal, politik, dan sosial ekonominya sehingga mereka dapat memperbaiki keadaan mereka” (Zastrow, 2015, hal. 50)

Pernyataan di atas menyatakan bahwa Pemberdayaan adalah proses membantu individu, keluarga, kelompok, organisasi, dan komunitas untuk meningkatkan kekuatan interpersonal, personal, politik, dan sosial ekonomi sehingga mereka dapat memperbaiki keadaannya. Pengertian tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Proses membantu individu, keluarga, kelompok, organisasi, dan komunitas (*the process of helping individuals, families, groups, and communities*).
2. Meningkatkan kekuatan/kemampuan personal, interpersonal, sosial-ekonomi, dan politik mereka (*increase their personal, interpersonal, socioeconomic, and political strength*).
3. Mengembangkan agar memperbaiki atau meningkatkan kehidupan mereka (*develop influence toward improving their circumstances*).

Berdasarkan pengertian dari para ahli, pemberdayaan dapat dipahami sebagai suatu proses yang bertujuan untuk membantu individu, keluarga, kelompok, maupun komunitas agar mampu meningkatkan kekuatan atau kemampuan mereka, baik secara personal, sosial, ekonomi, maupun politik, sehingga mereka bisa memperbaiki kondisi hidupnya. Pemberdayaan tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan dalam arti politik sempit, tetapi lebih kepada kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan, menentukan kebutuhannya sendiri, menyalurkan gagasan, mengakses sumber daya, dan mengelola kehidupannya secara mandiri. Dengan demikian, pemberdayaan bertujuan agar individu atau kelompok yang sebelumnya lemah dapat menjadi lebih percaya diri, mandiri, dan aktif dalam memperjuangkan hak serta meningkatkan kesejahteraannya.

2.1.1.2 Jenis-Jenis Pemberdayaan

Zastrow (2017) mengemukakan adanya 4 jenis kemampuan orang yang diberdayakan yaitu sebagai berikut:

1. Kemampuan Personal

Kemampuan ini mencakup peningkatan kepercayaan diri, pengendalian diri, dan kesadaran diri. Individu yang memiliki kemampuan personal yang baik akan lebih mampu mengenali potensi diri mereka, menetapkan tujuan, dan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Mereka juga akan lebih tangguh dalam menghadapi tantangan dan rintangan. Hal ini selaras dengan teori *Self-Efficacy* dari *Robert Adams* (2008), yang menyatakan bahwa keyakinan terhadap kemampuan diri untuk menyelesaikan tugas berpengaruh besar terhadap keberhasilan individu dalam mengambil tindakan. Kedua teori ini

menjelaskan bahwa pemberdayaan personal tidak hanya membutuhkan pengetahuan, tetapi juga penguatan keyakinan internal agar individu mampu bertindak secara mandiri dan bertanggung jawab atas pilihannya.

2. Kemampuan Interpersonal

Kemampuan ini melibatkan keterampilan dalam berkomunikasi, bekerja sama, dan membangun hubungan yang efektif dengan orang lain. Individu dengan kemampuan interpersonal yang baik dapat berinteraksi dengan orang lain secara efektif, memahami perspektif orang lain, dan bekerja dalam tim untuk mencapai tujuan bersama. Keterampilan seperti empati, mendengarkan aktif, dan resolusi konflik juga termasuk dalam kemampuan ini. Untuk mendukung aspek ini, teori *Humanistic Psychology* dari *Carl Rogers* (1961) menekankan pentingnya lingkungan yang menerima, empatik, dan autentik sebagai kondisi yang memungkinkan individu berkembang secara sosial. Ketika individu merasa aman dan dihargai, mereka lebih mampu mengekspresikan diri dan menjalin hubungan yang sehat. Oleh karena itu, pemberdayaan interpersonal tidak hanya terjadi melalui pembelajaran kognitif, tetapi juga melalui pengalaman emosional dan interaksi sosial yang transformatif.

3. Kemampuan Sosial Ekonomi

Kemampuan ini berkaitan dengan pemahaman dan pengelolaan sumber daya ekonomi, seperti keuangan, pekerjaan, dan akses terhadap layanan sosial. Individu yang memiliki kemampuan sosial ekonomi yang baik dapat mengelola keuangan pribadi atau kelompok secara efektif, memahami dinamika pasar kerja, dan memanfaatkan peluang ekonomi yang ada. Mereka juga dapat

mengakses dan menggunakan layanan sosial yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Teori *Capability Approach* dari Amartya Sen (1999) memperkuat pandangan ini dengan menekankan bahwa kesejahteraan sejati tidak hanya diukur dari apa yang dimiliki seseorang, tetapi dari sejauh mana ia memiliki kebebasan untuk memilih dan menjalani kehidupan yang bermakna. Dalam hal ini, kemampuan mengelola keuangan, menabung, serta memanfaatkan peluang usaha merupakan bentuk nyata dari kapabilitas yang memberikan kontrol atas kondisi ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh.

4. Kemampuan Politik

Kemampuan ini mencakup pemahaman tentang sistem politik dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan individu dan komunitas. Individu dengan kemampuan politik yang baik dapat mengadvokasi hak-hak mereka, berpartisipasi dalam organisasi atau gerakan sosial, dan mempengaruhi kebijakan publik yang relevan. Mereka juga memiliki keterampilan dalam negosiasi, advokasi, dan pembentukan jaringan yang luas. Perspektif ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Fung & Wright (2003), yang menyebut bahwa warga negara yang partisipatif adalah mereka yang sadar akan peran politiknya, serta terlibat aktif dalam kegiatan demokratis seperti musyawarah dan pemilu. Ketika perempuan mulai memahami prosedur birokrasi, menyuarakan pendapat dalam forum publik, dan bahkan tertarik menjadi bagian dari struktur pemerintahan lokal, itu menandakan terjadinya transformasi menuju budaya politik yang lebih inklusif dan demokratis.

Penggunaan teori *Zastrow* dalam pengambilan aspek pemberdayaan pada penelitian ini adalah karena teori tersebut menyajikan kerangka yang komprehensif dan sistematis mengenai jenis-jenis kemampuan yang harus dimiliki oleh individu yang diberdayakan, yaitu kemampuan personal, interpersonal, sosial ekonomi, dan politik. Keempat kemampuan ini relevan dan saling berkaitan dalam konteks pemberdayaan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti perempuan rawan sosial ekonomi dan perempuan kepala rumah tangga, yang tidak hanya membutuhkan peningkatan kepercayaan diri dan kesadaran diri, tetapi juga keterampilan dalam berinteraksi sosial, mengelola ekonomi, serta berpartisipasi dalam proses sosial dan politik. Saya dapat mengidentifikasi aspek-aspek pemberdayaan secara lebih terarah dan menyeluruh dengan mengacu pada teori *Zastrow*, sehingga analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menjadi lebih tajam dan memiliki dasar teoritis yang kuat.

2.1.1.3 Tujuan Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu upaya dalam proses peningkatan kemandirian masyarakat, melalui berbagai macam program seperti; pengembangan usaha ekonomi, penguatan sistem komunitas lokal, swadaya masyarakat, dan kegiatan lainnya yang mendekatkan masyarakat terhadap kesejahteraan. Tujuan utama pemberdayaan dititik beratkan mampu mengatasi segala problematika yang ada di masyarakat seperti, kemiskinan, kesenjangan, keterbelakangan dan menjadikannya lebih berdaya.

Menurut Parsons dalam Hatu (2010) pemberdayaan pada umumnya dilakukan secara kolektif dan bukan terjadi secara hand-to-hand diantar penggiat sosial dan individu akan tetapi tidak semua kegiatan kolektif mampu diintervensi oleh pekerja sosial. Praktik pemberdayaan masyarakat dalam beberapa kasus juga dilakukan secara individu ke individu.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses strategis yang diarahkan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat melalui berbagai program, seperti pengembangan usaha ekonomi, penguatan sistem komunitas lokal, dan swadaya masyarakat, guna mengatasi permasalahan kemiskinan, kesenjangan, serta keterbelakangan sosial, dengan tujuan utama tercapainya keadilan sosial. Secara khusus, pemberdayaan masyarakat bertujuan menciptakan kondisi kehidupan yang lebih baik melalui aspek pendidikan, aksesibilitas, tindakan sosial, kelembagaan, pengembangan bisnis, peningkatan pendapatan, pelestarian lingkungan, kualitas hidup, serta komunitas yang lebih kuat. Pemberdayaan ini pada umumnya dilakukan secara kolektif, meskipun dalam kondisi tertentu, intervensi pemberdayaan juga dapat berlangsung dalam lingkup individu ke individu.

2.1.1.4 Proses dan Tahapan Pemberdayaan

Menurut Huraerah (Darmayanti 2015) memberdayakan masyarakat memerlukan rangkaian proses yang panjang tidak seketika dan tidak langsung jadi. Lebih lanjut Huraerah mengatakan proses pemberdayaan cenderung dikaitkan sebagai unsur pendorong (*driving force*) sosial ekonomi dan politik. Pemberdayaan

dalam hal ini adalah suatu proses agar dapat berfungsi sebagai power dalam pencapaian tujuan yaitu pengembangan diri.

Menurut Huraerah dalam Putra, Wisadirana, dan Mochtar (2016) menjelaskan proses pemberdayaan masyarakat dapat dipahami dengan singkatan 5P yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan yang akan dijelaskan lebih jelas maksud dari masing-masing kata yang mewakili proses pemberdayaan tersebut yakni.

1. Pemungkinan adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat struktural dan kultural yang menghambat.
2. Penguatan adalah memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhankebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri yang menunjang kemandirian mereka.
3. Perlindungan yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, meghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

4. Penyokongan adalah memberi bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan adalah memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah:

1. Tahapan pertama, membantu masyarakat dalam menemukan masalahnya.
2. Tahapan kedua, melakukan analisis terhadap permasalahan tersebut secara mandiri.
3. Tahapan ketiga, menentukan skala prioritas masalah.
4. Tahapan keempat, mencari penyelesaian masalah yang sedang dihadapi.
5. Tahapan kelima, melaksanakan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.
6. Tahapan keenam, mengevaluasi seluruh rangkaian dan proses pemberdayaan untuk dinilai sejauh mana keberhasilan dan kegagalannya.

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses panjang yang tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan memerlukan keterlibatan aktif dan berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa sebagai agen perubahan.

Proses ini bertujuan untuk mendorong masyarakat agar mampu mengembangkan potensi dirinya secara mandiri, memperkuat kapasitas dalam menyelesaikan permasalahan, melindungi kelompok yang rentan, serta memberikan dukungan dan menjaga keseimbangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Ada lima aspek utama yang menjadi fokus, yaitu menciptakan peluang, memperkuat kemampuan, memberikan perlindungan, menyokong peran masyarakat, serta menjaga kondisi yang adil dan seimbang. Pemberdayaan juga dilakukan melalui tahapan yang sistematis, dimulai dari mengidentifikasi permasalahan, melakukan analisis secara mandiri, menentukan prioritas, mencari solusi, melakukan tindakan nyata, hingga mengevaluasi proses dan hasilnya serta dengan memahami dan menjalankan proses tersebut secara konsisten, mahasiswa dapat berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri, berdaya, dan berkeadilan sosial.

2.1.2 Konsep tentang Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

2.1.2.1 Pengertian Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Peraturan Menteri Sosial No 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, yang dimaksud Perempuan Rawan Sosial Ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Minimnya penghasilan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi dapat disebabkan dalam dunia pekerjaan dan mengakibatkan mereka memiliki penghasilan yang rendah bahkan tidak berpenghasilan sama sekali.

Kemudian Hau dan Listymasing (2000), menyatakan bahwa, Perempuan kepala rumah tangga adalah wanita yang dianggap bertanggung jawab terhadap rumah tangganya, yaitu: (1) wanita tidak kawin yaitu wanita yang tidak terikat dengan perkawinan dan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya; (2) wanita kawin yaitu wanita yang terikat dalam perkawinan tetapi tempat tinggalnya terpisah dengan suami sehingga wanita tersebut mengepalai rumah tangganya, (3) wanita cerai hidup atau cerai mati dan belum menikah lagi dan tidak kembali ke keluarga yang melahirkan atau mertua.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan dalam Peraturan Menteri Sosial No. 8 Tahun 2017 serta pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) adalah perempuan dewasa, baik yang menikah, belum menikah, maupun janda, yang tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari akibat keterbatasan dalam akses pekerjaan dan ekonomi sementara itu, perempuan kepala rumah tangga adalah perempuan yang secara sosial dan ekonomi bertanggung jawab atas keberlangsungan rumah tangganya, baik karena belum menikah, bercerai, ditinggal mati oleh suami, maupun tinggal terpisah dari suami. Kedua kelompok ini memiliki kerentanan yang serupa, yaitu berada dalam kondisi kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan akses terhadap sumber daya, dan minimnya dukungan sosial, sehingga menempatkan mereka sebagai kelompok yang memerlukan perhatian dan intervensi khusus dalam kebijakan sosial dan program pemberdayaan.

2.1.2.2 Karakteristik Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Peneliti merujuk kepada keputusan Peraturan Menteri Sosial No 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelola Data Penyandang Masalah Kesejaluran Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang tercantum dalam lampiran angka 23 terkait pembagian karakteristik Perempuan Rawan Sosial Ekonomi diantaranya sebagai berikut.

1. Perempuan berusia 18 (delapan belas tahun) sampai dengan 59 (lima puluh Sembilan) tahun,
2. Istri yang ditinggal suami tanpa alasan yang jelas,
3. Menjadi pencari nafkah utama keluarga,
4. Berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi kebutuhan hidup.

Berdasarkan pedoman yang berlaku, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi memiliki karakteristik tertentu yang menjadikannya kelompok yang rentan secara sosial dan ekonomi. Kriteria tersebut meliputi perempuan yang berusia antara 18 hingga 59 tahun, istri yang ditinggalkan suaminya tanpa alasan yang jelas, menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah, serta memiliki penghasilan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan pentingnya perhatian khusus terhadap kelompok perempuan ini dalam berbagai program pemberdayaan dan perlindungan sosial, agar mereka dapat bertahan dan bangkit dari keterbatasan yang mereka alami, serta mencapai kehidupan yang lebih layak dan mandiri.

2.1.3 Konsep tentang Sekolah Perempuan Hebat

2.1.3.1 Pengertian Sekolah Perempuan Hebat

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bambang Rustanto, Sekolah Perempuan Hebat (SPH) adalah model edukasi bagi para perempuan rentan yang ada di Kabupaten Bandung SPH dimaknai sebagai ruang belajar untuk meningkatkan kapasitas perempuan pada level individu, antar-individu, dan antar-kelompok.

Sekolah Perempuan Hebat (SPH) bersifat informal dengan metodologi pemilikan bagi orang dewasa yang mengedepankan proses saling berbagi serta menggali dan memperkaya budaya setempat. Setiap Informan memiliki pengalaman dan pengetahuan yang harus dihargai, didengarkan, dan menjadi pembelajaran bersama.

2.1.3.2 Manfaat Sekolah Perempuan Hebat

Manfaat Sekolah Perempuan Hebat bagi PRSE agar perempuan dapat yakni sebagai berikut.

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dasar,
2. Saling belajar, berbagi, dan mencari solusi atas masalah-masalah yang dihadapinya, dan
3. Melakukan konsolidasi, kerjasama, dan advokasi pemenuhan hak hak perempuan sebagai warga negara.

2.1.3.3 Tujuan Sekolah Perempuan Hebat

Secara Spesifik tujuan dari pembentukan Sekolah Perempuan Hebat ada dua, yaitu sebagai berikut.

1. Tujuan Umum Perempuan Rentan menjadi Kelompok *Survival* Mandiri yang mampu mengaplikasikan keterampilan *Coping strategy* dan keterampilan usaha ekonomi produksi dalam kehidupan rumah tangga dan bermasyarakat.
2. Tujuan Khusus Perempuan Informan SPH diharapkan mampu melaksanakan Perubahan Perilaku Kemampuan Survival Mandiri dalam hal:
 - a. Ketahanan Sosial Keluarga
 - b. Gender Harmoni Keluarga dan masyarakat,
 - b. Pendidikan dan Pengasuhan Anak
 - c. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Rumah Tangga.
 - d. Pengelolaan Keuangan Keluarga dan Pengembangan Koperasi,
 - e. Pengembangan Usaha dan Pemasaran Produksi Rumah Tangga
 - f. Perumahan dan Lingkungan Hidup,
 - g. Gizi dan Kesehatan Keluarga, dan
 - h. Aksesibilitas Pelayanan Publik

Berdasarkan uraian diatas Sekolah Perempuan Hebat bertujuan untuk mengubah para perempuan rentan menjadi perempuan tangguh yang mandiri, terampil, produktif, dan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Mandiri yang dimaksud adalah tidak memiliki ketergantungan dengan yang lain sehingga mampu berdiri sendiri dalam hal ekonomi maupun dalam lainnya yang menyangkut kehidupannya dalam keluarga Dengan kata lain, perempuan tersebut menjadi berdaya.

2.1.4 Konsep tentang Praktik Pekerjaan Sosial dengan Kemiskinan

2.1.4.1 Pengertian Pekerja Sosial

Pekerjaan sosial “Merupakan suatu metoda institusi untuk membantu orang mencegah dan memecahkan masalah mereka.” (Heru Sukoco, 2011, hal. 3).

Lebih jauh dia mengatakan bahwa pekerjaan sosial merupakan suatu institusi sosial, merupakan suatu profesi pelayanan kemanusiaan dan merupakan suatu praktek yang ilmiah dan teknis. *Allen Pincus* dan *Anne Minahan* menyatakan bahwa “Pekerjaan Sosial berkepentingan dengan permasalahan interkasi antara orang dengan lingkungan sosialnya, sehingga mereka mampu melaksanakan tugas-tugas kehidupan, mengurangi ketegangan, mewujudkan aspirasi dan nilai-nilai mereka.” (Heru Sukoco, 2011, hal. 4).

Walter A. Friedlander dan *Robert Z. Apte* mengemukakan bahwa "Pekerjaan sosial merupakan suatu pelayanan profesional, yang prakteknya didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan ilmiah tentang relasi manusia, sehingga dapat membantu individu, kelompok, masyarakat mencapai kepuasan pribadi dan sosial serta kebebasan." (Heru Sukoco, 2011, hal. 5)

Charles Zastrow mendefinisikan pekerjaan sosial sebagai "Suatu kegiatan profesional untuk membantu individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat guna meningkatkan dan memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan bagi mereka mencapai tujuan." (Heru Sukoco, 2011, hal. 7)

Berdasarkan beberapa definisi yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pekerjaan sosial merupakan suatu pelayanan sosial yang bersifat profesional yang ditujukan untuk membantu individu, kelompok maupun masyarakat agar mereka mampu memperbaiki serta meningkatkan keberfungsian sosialnya.

2.1.4.2 Prinsip Pekerjaan Sosial

Prinsip-prinsip pekerjaan sosial adalah:

1. Penerimaan bahwa pekerja sosial harus menerima klien apa adanya, tanpa menghakimi klien tersebut
2. Komunikasi, bahwa pekerja sosial harus mampu menangkap pesan atau keinginan dari klien dan mampu menggali permasalahan klien.
3. Individualisasi, yaitu pemahaman bahwa setiap individu berbeda satu dengan yang lainnya.
4. Partisipasi, yaitu ikut mengajak klien untuk turut serta berperan aktif dalam menghadapi masalah yang dihadapinya.
5. Kerahasiaan, pekerja sosial harus mampu menjaga kerahasiaan dari masalah yang dihadapi klien,
6. Kesadaran diri, pekerja sosial harus mampu mengendalikan diri sehingga tidak terhanyut oleh perasaan klien. (Adi, 2005, hal 78)

2.1.4.3 Tujuan Pekerjaan Sosial

Allen Pincus dan Anne Minahan menyatakan bahwa pekerjaan Sosial bertujuan untuk mencapai kesejahteraan orang, baik ia sebagai individu maupun kolektivitas."Pekerjaan sosial berusaha membantu orang agar mereka memahami kondisi dan kenyataan-kenyataan yang dihadapi dengan cara meningkatkan kemampuan, mengkaitkannya dengan sistem sumber dan mempengaruhi kebijakan sosial" (Heru Sukoco, 2011, hal. 19). *Dean H. Hepworth dan Jo Ann Larsen* dalam mengemukakan tujuan pekerjaan sosial adalah:

1. Membantu orang memperluas kompetensinya dan meningkatkan kemampuan mereka untuk menghadapi serta memecahkan masalahnya.
2. Membantu orang memperoleh sumber-sumber.

3. Membuat organisasi organisasi yang responsive dalam memberikan pelayanan kepada orang
4. Memberikan fasilitas antara individu dengan individu lain di dalam lingkungan mereka
5. Mempengaruhi interaksi antara organisasi-organisasi dengan institusi-institusi
6. Mempengaruhi kebijakan sosial maupun kebijakan lingkungan. (Heru Sukoco, 2011, hal 19)

2.1.4.4 Tahapan dan Proses Pertolongan Pekerjaan Sosial

Max Siporin dalam Iskandar (2013) membagi proses pertolongan pekerjaan sosial kedalam enam tahap yakni sebagai berikut.

1. Engagement, Intake and Contract

Tahap ini merupakan tahap permulaan pekerja sosial bertemu dengan klien. Dalam proses ini terjadi pertukaran informasi mengenai apa yang dibutuhkan klien, pelayanan apa yang dapat diberikan oleh pekerja sosial dan lembaga sosial dalam membantu dan memenuhi kebutuhan klien atau memecahkan masalah klien. Pada akhirnya dapatlah dibuat suatu kontrak antara pekerja sosial dengan klien. Kontrak adalah kesepakatan antara pekerja sosial dengan klien di dalamnya dirumuskan hakekat permasalahan klien, tujuan-tujuan pertolongan yang hendak dicapai, peranan-peranan dan harapan-harapan pekerja sosial dan klien, metode pertolongan yang akan digunakan serta pengaturan-pengaturan pertolongan lainnya.

2. Assesmen

Asesmen merupakan proses pengungkapan dan pemahaman masalah dan kebutuhan klien. Dalam rangka asesmen ini pekerja sosial dapat mempergunakan teknik-teknik wawancara, observasi, dan teknik pengumpulan data lainnya yang dianggap tepat.

3. Rencana Intervensi

Merupakan proses penelaahan dan penyusunan rencana program pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan klien. Beberapa metode yang digunakan dalam perencanaan intervensi adalah wawancara, diskusi, pembahasan kasus.

4. Intervensi

Merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan perubahan berencana dalam diri klien dan situasinya. Pelaksanaan intervensi dilaksanakan sesuai rencana yang sebelumnya dibahas.

5. Evaluasi

Merupakan penilaian terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam *planning* serta melihat kembali kemajuan-kemajuan yang telah dicapai sehubungan dengan tujuan. Evaluasi terdiri dari dua yaitu evaluasi proses, berkenaan dengan berlangsungnya kegiatan dan evaluasi hasil, berkenaan dengan evaluasi dari program yang sudah dilaksanakan.

6. Terminasi dan rujukan

Tahap ini dilakukan apabila tujuan-tujuan yang ada di kontrak telah tercapai dan mungkin sudah tidak dicapai dalam kemajuan-kemajuan berarti. Terminasi dan rujukan merupakan kegiatan pengakhiran dari keseluruhan proses praktikum yang telah dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi terhadap intervensi yang telah dilaksanakan.

2.1.4.5 Metode Pekerjaan Sosial Group Work

The National of Social Work mengemukakan pengertian *Social Group Work* adalah Suatu pelayanan kepada kelompok, yang tujuan utamanya untuk membantu anggota kelompok memperbaiki penyesuaian sosial mereka (*social adjustment*), dan tujuan keduanya untuk membantu kelompok mencapai tujuan-tujuan yang disepakati oleh masyarakat. Selain itu, *Trecker* menyatakan bahwa *social groupwork* adalah "Metode dimana pekerja sosial membimbing interaksi individu dalam kelompok pada suatu program kegiatan sehingga mereka mampu berhubungan antara satu dengan yang lainnya." (Sundayani, 2015, hal. 20)

Berdasarkan pernyataan para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa *social groupwork* itu adalah metode untuk menghadapi masalah individu-individu dalam suatu kelompok sehubungan dengan meningkatkan kemampuan mereka dalam melaksanakan fungsi sosial.

1. Peran Pekerjaan Sosial dengan Kelompok

Adapun peran pekerja sosial dalam pengembangan masyarakat (*community development*) menurut *Spergel* dan *Zastrow* dalam *Adi* (2014) adalah:

- a. Peran Fasilitator, yakni membantu masyarakat agar dapat mengartikulasikan kebutuhan mereka dengan memanfaatkan potensi yang ada.
- b. Perantara (*Broker*), yakni menghubungkan individu atau masyarakat yang membutuhkan layanan masyarakat.
- c. Pendidik (*Education*), Menyampaikan informasi dengan informasi dengan jelas, serta mudah ditangkap oleh sasaran perubahan.

- d. Tenaga Ahli (*Expert*), memberikan masukan dan dukungan informasi dalam berbagai area sebagai bahan pertimbangan masyarakat/organisasi dalam proses pengambilan keputusan.
- e. Perencanaan sosial (*Social Planner*), yakni mengumpulkan data tentang masalah sosial, menganalisis data sampai dengan tersusunnya perencanaan program sebagai solusi atas masalah yang dihadapi klien.
- f. Advokat (*Advocate*), melakukan pembelaan yang mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan pertolongan ataupun layanan
- g. Aktivis (*Activist*), yakni melakukan perubahan institusional yang lebih mendasar, dengan tujuannya adalah pengalihan sumber daya ataupun kekuasaan pada kelompok yang kurang beruntung

Peran-peran di atas dilaksanakan melalui tugas-tugas pekerja sosial diantaranya: mengadakan kontak dengan individu atau kelompok yang membutuhkan pertolongan dalam menghadapi kehidupan, memberikan informasi tentang adanya sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan, tentang permasalahan prosedur pelayanan, kondisi yang perlu dirubah melalui perubahan kebijakan dan sebagainya.